



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA,  
DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN  
BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018)**

SKRIPSI

Rifka Medinia

14020250125

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2019



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA,  
DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN  
BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018)**

SKRIPSI

Rifka Medinia

1402025109

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
JAKARTA  
2019

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul **“PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA, DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018”** merupakan hasil karya sendiri sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan dan/atau ditulis oleh orang lain sebelumnya, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang ada di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 8 Agustus 2019

Yang Menyatakan,



Rifka Medinia  
NIM. 1402025109

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rifka Medina  
NPM : 1402025109  
Program Studi : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA, DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”.**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalih mediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta  
Pada tanggal : 8. Agustus 2019  
Yang Menyatakan,



(Rifka Medina)



## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :

**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ADD,  
KEBIJAKAN DESA, DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP  
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KEC.  
NGAMPRAH KAB. BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018)**

Yang disusun oleh :

Rifka Medina  
1402025109

Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata-satu  
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah

Prof. DR. HAMKA

Pada tanggal : 8 Agustus 2019

### Tim Penguji :

Ketua, merangkap anggota :



(Darham Heriansyah, SE., M.Si.)

Sekretaris, merangkap anggota :



(Fitrisia, SE., M.Si., Ak., CA.)

Anggota :



(Sumardi, SE., M.Si.)

### Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Prof. DR. HAMKA



Sumardi, S.E., M.Si



Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**JUDUL** : **PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA, DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGAMPRAH KAB. BANDUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2018)**

**NAMA** : **RIFKA MEDINIA**

**NIM** : **1402025109**

**PROGRAM STUDI** : **AKUNTANSI**

**TAHUN AKADEMIK** : **2018-2019**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi :

Pembimbing I	M. Nurrasyidin, S.E.,M.Si.	
Pembimbing II	Sumardi, S.E.,M.Si.	

**Mengetahui,**  
Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Sumardi, S.E., M.Si.

## ABSTRAKSI

Rifka Medina (1402025109)

### **“PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN ALOKASI DANA DESA, KEBIJAKAN DESA, DAN KELEMBAGAAN DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT”**

*Skripsi Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2019. Jakarta*

*Kata kunci : Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa, Kesejahteraan Masyarakat*

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah “kesejahteraan masyarakat” sebagai variabel dependen serta “akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa” sebagai variabel independent. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu maka sampel yang digunakan adalah 6 (enam) desa di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan, data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan data sekunder yang terdapat di Laporan Rekapitulasi Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang terdapat di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Teknis pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah analisis akuntansi, analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi  $R^2$  dengan menggunakan *software* SPSS Versi 25.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tingkat signifikansi sebesar  $(0,000 <$



0,050). Kebijakan desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tingkat signifikansi sebesar ( $0,643 > 0,050$ ). Kelembagaan Desa berpengaruh negatif dan tidak signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar ( $0,074 > 0,050$ ). Adapun secara simultan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan tingkat signifikansi sebesar ( $0,000 < 0,050$ ). Berdasarkan hasil *Adjusted R Square* yaitu sebesar 0,402, yang artinya adalah 40,2% variable dependen kesejahteraan masyarakat dijelaskan oleh variabel independen akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa, dan sisanya sebesar 59,8% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini seperti pendapatan asli desa, belanja desa, dana desa, penggunaan dana bagi hasil pajak, dan bantuan keuangan Kabupaten/Provinsi.

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa saran bagi penelitian selanjutnya yaitu diharapkan dapat memperluas wilayah cakupan yang lebih luas. Kemudian dapat menambahkan variabel-variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Serta diharapkan dapat menambahkan atau memperbanyak sampel agar hasil penelitian lebih akurat.



## ABSTRACT

Rifka Medina (1402025109)

### **“THE EFFECT OF OF ACCOUNTABILITY OF FINANCIAL MANAGEMENT OF ALLOCATION OF VILLAGE FUNDS, VILLAGE POLICY, AND VILLAGE INSTITUTION ON COMMUNITY WELFARE”**

*Thesis. Bachelor Degree Program of Accounting Study. Faculty of Economics and Business University of Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2019. Jakarta.*

*Keywords: Village Fund Allocation, Village Policy, Village Institution, Community Welfare*

This study aims to examine the effect of accountability in financial management of village fund allocation, village policy, and village institutions on community welfare.

The variables used in this study are "community welfare" as the dependent variable and "financial management accountability for village fund allocation, village policy, and village institutions" as independent variables. Sampling in this study using purposive sampling, namely the determination of samples based on certain criteria, the sample used is 6 (six) villages in the District of Ngamprah, West Bandung Regency. Whereas, the data used is in the form of primary data obtained using questionnaires and secondary data contained in the Recapitulation Report on the Realization of the Implementation of the Village Budget for Budget Year 2018 in Ngamprah District, West Bandung Regency. Technical analysis and data analysis used are accounting analysis, descriptive statistical analysis, data quality test, multiple linear regression analysis, classical assumption test, hypothesis test, and coefficient of determination  $R^2$  using SPSS Version 25 software.

The results of this study indicate that partially accountability of financial management village fund allocation has a positive and significant effect on community welfare with a significance level of  $(0,000 < 0,050)$ . Village policy has a negative and not significant effect on community welfare with a significance

level of  $(0.643 > 0.050)$ . Village Institution has a negative and not significant effect with a significance level of  $(0.074 > 0.050)$ . The simultaneous accountability of financial management for village fund allocation, village policy, and village institutions has a positive and significant effect on community welfare with a significance level of  $(0,000 < 0,050)$ . Based on the results of Adjusted R Square which is equal to 0.402, which means that the 40.2% dependent variable of community welfare is explained by the independent variables of financial management accountability of village fund allocation, village policy, and village institutions, and the remaining 59.8% is explained by other variables outside the independent variables used in this study were village original income, village expenditure, village funds, use of tax-sharing funds, and district / provincial financial assistance.

From this research, the author gives some suggestions for further research that is expected to expand the area of broader coverage. Can then add variable-other variables that may affect the welfare of the community. And is expected to add or multiply the sample so that the research results more accurate.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah* segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat)”**. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju alam pencerahan. Serta ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu sabar dan perhatian. Skripsi ini penulis dedikasikan untuk kedua orang tua, terima kasih atas kasih sayang, motivasi, nasihat dan dukungannya baik moril maupun materil serta do'a yang tidak henti-hentinya dipanjatkan hingga selesai dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan dan kekurangan, penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya usaha, bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Suyatno, M. Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Zulpahmi, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.9109fvvg

4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.i., selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Sumardi, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dan Pembimbing II yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan serta saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan serta saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Dosen-dosen yang telah memberi bekal ilmu yang berguna selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
9. Bapak Drs. Med Ardiwilaga, M.Si., selaku Camat Ngamprah dan seluruh Kepala Desa yang berapada di Kecamatan Ngamprah yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian. Serta Rukun Tetangga di setiap desa yang telah bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini.
10. Teruntuk keluargaku, Ayah, Ibu, bapak mertua, mama mertua, suamiku tercinta Herry Pariyanto dan anakku Ankita Khansa Khumaeroh. Serta kakak kandung, Kakak Ipar, dan Adik Ipar semua yang sudah menyemangati kuliah saya.
11. Seluruh teman-teman program studi Akuntansi UHAMKA angkatan 2014 dan 2015.
12. Kolega di PT. Anugrah Bhakti Bumi, Ibu Irin, Ibu Ulfah, Bapak Andri, Bapak Agus, Dimas, David, dan Rano.
13. Seluruh staf bagian akademik dan kemahasiswaan serta seluruh karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Semoga semua kebaikan yang telah kalian berikan dibalas oleh Allah SWT.



Akhir kata, peneliti mohon maaf jika dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan yang tidak disadari. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak.

*Billahi fii sabiililhaq Fastabiqul Khairat*

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Jakarta, 5 Juni 2019

Penulis

(Rifka Medina)



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	vi
<b>ABSTRAKSI</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Permasalahan .....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah .....	5
1.2.2 Pembatasan Masalah .....	6
1.2.3 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu .....	9
2.2 Telaah Pustaka .....	25
2.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa .....	25
2.2.1.1 Akuntabilitas .....	25
2.2.1.1.1 Pengertian Akutabilitas .....	25
2.2.1.2 Laporan Keuangan .....	26
2.2.1.2.1 Pengertian Laporan Keuangan .....	26

2.2.1.2.2	<i>Tujuan Laporan Keuangan</i> .....	26
2.2.1.2.3	<i>Pengunaan Laporan Keuangan</i> .....	27
2.2.1.2.4	<i>Komponen Laporan Keuangan</i> .....	28
2.2.1.2.5	<i>Kualitas Laporan Keuangan</i> .....	29
2.2.1.3	<i>Pengelolaan Keuangan Desa</i> .....	31
2.2.1.3.1	<i>Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa</i> .....	31
2.2.1.3.2	<i>Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa</i> .....	32
2.2.1.3.3	<i>Tahapan Kegiatan Pengelolaan Keuangan Desa</i> .....	33
2.2.1.3.4	<i>Peran dan Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa</i> .....	35
2.2.1.4	<i>Alokasi Dana Desa</i> .....	36
2.2.1.4.1	<i>Pengertian Alokasi Dana Desa</i> .....	36
2.2.1.4.2	<i>Pengelolaan Alokasi Dana Desa</i> .....	37
2.2.1.4.3	<i>Menghitung Alokasi Dana Desa</i> .....	38
2.2.1.4.4	<i>Tujuan Alokasi Dana Desa</i> .....	39
2.2.1.4.5	<i>Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan pengawasan Alokasi Dana Desa</i> .....	40
2.2.2	<i>Kebijakan Desa</i> .....	42
2.2.2.1	<i>Pengertian Kebijakan Desa</i> .....	42
2.2.2.2	<i>Macam-Macam Kewenangan Desa</i> .....	43
2.2.3	<i>Kelembagaan Desa</i> .....	45
2.2.3.1	<i>Pengertian Kelembagaan Desa</i> .....	45
2.2.3.2	<i>Macam-Macam Bentuk Kelembagaan Desa</i> .....	46
2.2.4	<i>Kesejahteraan Masyarakat</i> .....	49
2.2.4.1	<i>Pengertian Kesejahteraan Masyarakat</i> .....	49
2.2.4.2	<i>Tingkat Kesejahteraan Masyarakat</i> .....	49
2.3	<i>Kerangka Pemikiran Teoritis</i> .....	51
2.4	<i>Rumusan Hipotesis</i> .....	54

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

3.1	Metode Penelitian .....	55
3.2	Operasional Variabel .....	55
3.3	Populasi dan Sampel.....	58
3.4	Teknik Pengumpulan Data .....	60
3.4.1	<i>Tempat dan Waktu Penelitian</i> .....	61
3.4.2	<i>Teknik Pengumpulan Data</i> .....	61
3.5	Teknik Pengolahan data.....	62

### **BAB IV HASIL PEMBAHASAN**

4.1	Hasil Penelitian .....	70
4.1.1	<i>Gambaran Umum Objek Penelian</i> .....	70
4.1.1.1	<i>Gambaran Umum Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat</i> .....	70
4.1.1.2	<i>Gambaran Umum Sampel Penelitian</i> .....	73
4.1.2	<i>Deskripsi Data</i> .....	76
4.2	Pembahasan.....	83
4.2.1	<i>Analisis Akuntansi</i> .....	83
4.2.2	<i>Analisis Statistik</i> .....	111
4.2.3	<i>Uji Kualitas Data</i> .....	112
4.2.3.1	<i>Uji Validitas</i> .....	112
4.2.3.2	<i>Uji Reliabilitas</i> .....	114
4.2.4	<i>Analisis Regresi Linier Berganda</i> .....	115
4.2.5	<i>Uji Asumsi Klasik</i> .....	117
4.2.5.1	<i>Uji Normalitas Desa</i> .....	117
4.2.5.2	<i>Uji Heteroskedastisitas</i> .....	120
4.2.5.3	<i>Uji Multikolinieritas</i> .....	121
4.2.5.4	<i>Uji Autokorelasi</i> .....	122
4.2.6	<i>Uji Hipotesis</i> .....	123
4.2.6.1	<i>Uji Statistik t</i> .....	123
4.2.6.2	<i>Uji Statistik F</i> .....	125
4.2.7	<i>Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)</i> .....	126



4.3 Interpretasi Hasil Penelitian.....	127
--	-----

**BAB V PENUTUP**

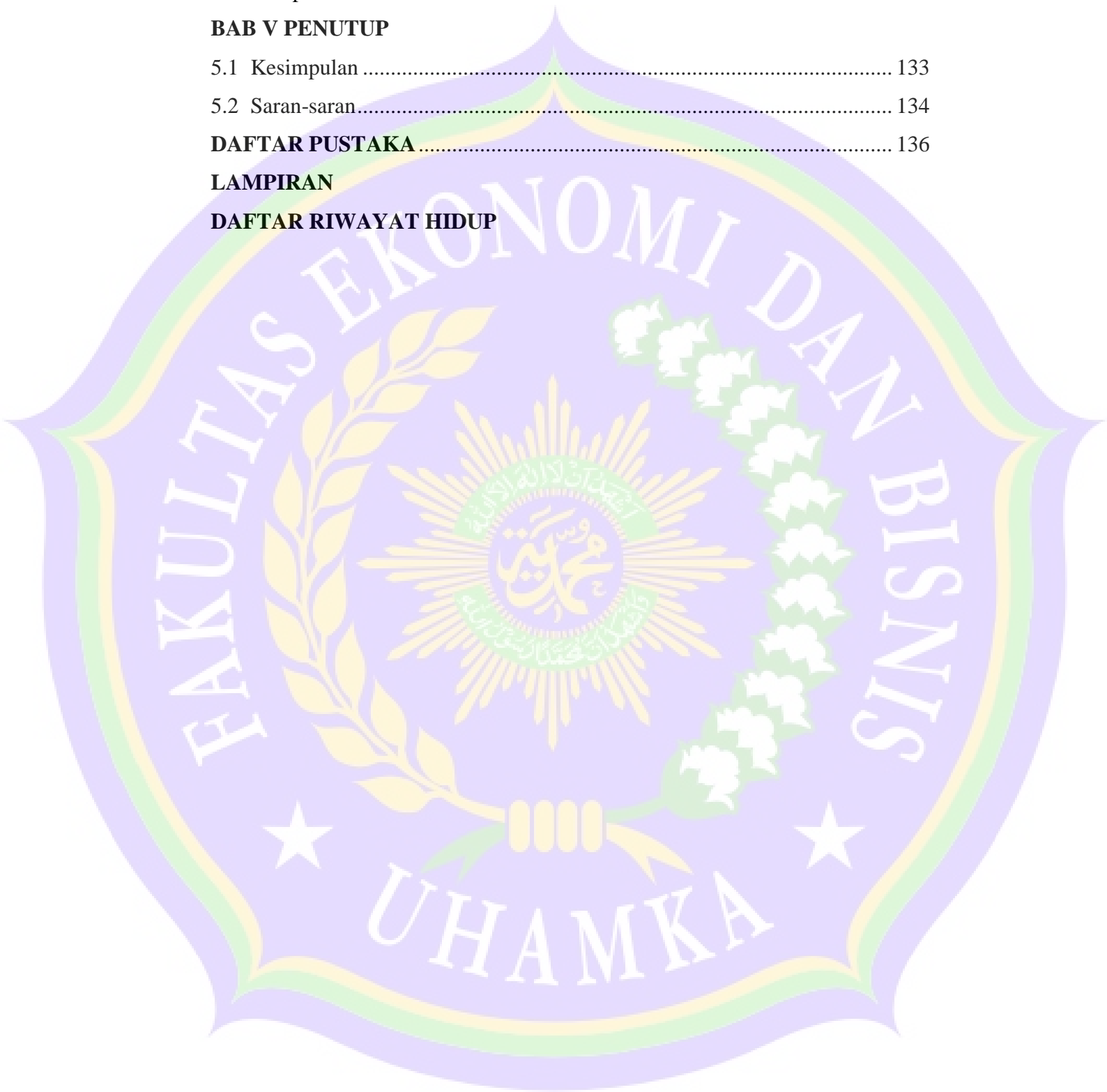
5.1 Kesimpulan .....	133
----------------------	-----

5.2 Saran-saran.....	134
----------------------	-----

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>136</b>
-----------------------------	------------

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Gambaran Penelitian Terdahulu .....	15
2	Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	32
3	Operasional Variabel Penelitian .....	56
4	Daftar Desa di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat..	58
5	Sampel Penelitian .....	60
6	Skala Likert.....	62
7	Jumlah Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018.....	72
8	Geografi .....	73
9	Banyaknya RW, RT, dan Jumlah Dusun .....	73
10	Jumlah Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin .....	74
11	Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian .....	74
12	Jumlah Fasilitas Kesehatan.....	75
13	Jumlah Sampel Penelitian.....	76
14	Sampel Desa di Kecamatan Bandung Barat .....	77
15	Jenis Kelamin Responden.....	77
16	Usia Responden .....	78
17	Jenjang Pendidikan Responden .....	78
18	Pekerjaan .....	79
19	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa .....	80
20	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kebijakan Desa .....	81
21	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kelembagaan Desa.....	81
22	Rekapitulasi Jawaban Responden Variabel Kesejahteraan Masyarakat.....	82
23	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y) .....	83

24	Pengaruh Kebijakan Desa (X2) terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	93
25	Pengaruh Kelembagaan Desa (X3) terhadap Kesejahteraan Masyarakat.....	102
26	<i>Descriptive Statistic</i> .....	111
27	Uji Validasi Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1), Kebijakan Desa (X2), Kelembagaan Desa (X3), Dan Kesejahteraan Masyarakat (Y).....	113
28	Uji Reliabilitas pada Kuesioner Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1), Kebijakan Desa (X2), Kelembagaan Desa (X3), dan Kesejahteraan Masyarakat (Y).....	115
29	Regresi Linier Berganda.....	116
30	<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> .....	118
31	Uji Multikolinieritas .....	121
32	Uji Autokorelasi .....	122
33	Uji Signifikansi Koefisien Regresi Parsial Secara Individu.....	124
34	Uji Statistik F.....	125
35	Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	126

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Siklus Pengelolaan Keuangan Desa.....	33
2	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis.....	53
3	<i>Normal Probability Plot</i> Uji Normalitas.....	119
4	Histogram Uji Normalitas.....	119
5	Uji Heteroskedastisitas.....	120



## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1.	Kuesioner Penelitian .....	1/52
2.	Rekapitulasi Hasil Jawaban Responden.....	5/52
3.	Deskripsi Data Responden .....	13/52
4.	Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa.....	15/52
5.	Hasil Uji Validitas Variabel Kebijakan Desa.....	16/52
6.	Hasil Uji Validitas Variabel Kelembagaan Desa .....	17/52
7.	Hasil Uji Validitas Variabel Kesejahteraan Masyarakat.....	18/52
8.	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Alokasi Dana Desa .....	19/52
9.	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kebijakan Desa .....	19/52
10.	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kelembagaan Desa .....	19/52
11.	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Kesejahteraan Masyarakat .....	19/52
12.	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda .....	20/52
13.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	20/52
14.	Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	22/52
15.	Hasil Uji Multikolinieritas .....	22/52
16.	Hasil Uji Autokorelasi.....	22/52
17.	Hasil Uji Statistik T.....	23/52
18.	Hasil Uji Statistik F.....	23/52
19.	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	23/52
20.	Tabel Distribusi R .....	24/52
21.	Tabel Distribusi F.....	26/52
22.	Tabel Distribusi T.....	27/52
23.	Tabel Durbin-Watson.....	28/52
24.	Surat Pernyataan dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bandung Barat .....	29/52
25.	Surat Pernyataan dari Kecamatan Ngamprah .....	30/52

26. Surat Pernyataan dari Kantor Kepala Desa Tanimulya.....	31/52
27. Surat Pernyataan dari Kantor Kepala Desa Gadobangkong.....	32/52
28. Surat Pernyataan dari Kantor Kepala Desa Pakuhaji.....	33/52
29. Surat Pernyataan dari Kantor Kepala Desa Cilame.....	34/52
30. Surat Pernyataan dari Kantor Kepala Desa Mekarasi.....	35/52
31. Surat Pernyataan dari Kantor Kepala Desa Sukatani.....	36/52
32. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Ngamprah.....	37/52
33. Laporan Rekapitulasi Penyaluran dan Penggunaan ADD.....	38/52
34. Lapotan Realisasi Penggunaan ADD.....	39/52
35. Formulir Pengajuan Judul Proposal.....	46/52
36. Formulir Pengajuan Persetujuan Judul Proposal Skripsi.....	47/52
37. Formulir Perubahan Judul Skripsi.....	48/52
38. Surat Tugas.....	49/52
39. Catatan Konsultasi Skripsi Pembimbing I.....	50/52
40. Catatan Konsultasi Skripsi Pembimbing 2.....	51/52
41. Daftar Riwayat Hidup.....	52/52

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Saat ini pemerintah sedang mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar antaranya laju pembangunan kota dan desa semakin seimbang dan serasi. Tetapi dalam pembangunan masih dihadapkan pada persoalan seperti ketimpangan atau ketidakmerataan pembangunan antara kota dan desa. Menanggapi permasalahan tersebut, strategi pemerintahan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap pembangunan desa (Chandra Kusuma Putra, 2013). Dimana desa merupakan salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan urusan pemerintah yang bersumber dari pemerintah pusat, karena desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah pusat lebih cepat tersampaikan dan desa di tuntut untuk melakukan pengelolaan dengan sebaik mungkin. (Rahma Fajri, 2015).

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri

serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah social budaya lainnya dapat diminimalisi. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Mewujudkan pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas yang dilakukan pada level pemerintah desa merupakan konsekuensi dari otonomi desa. Untuk mewujudkan itu, diperlukannya pengawasan dari pemerintah daerah dan provinsi serta peran masyarakat dalam pengelolaan APBDesa agar pengelolaan yang dilakukan oleh aparat desa dapat berjalan dan digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, pengelolaan keuangan desa yang di maksud sesuai dengan (Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa) mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, dilaksanakan dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta di lakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P 2017 telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 60 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.954 desa. Selain Dana Desa, sesuai UU Desa pasal 72, Desa memiliki



Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; dan Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan bantuan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Alokasi dana desa merupakan dana yang cukup signifikan bagi desa untuk menunjang program-program desa dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik menunjukkan keberhasilan kinerja keuangan dan akan mewujudkan kemandirian keuangan sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat akan berkurang. Hal ini didukung dengan penelitian (Asni, 2013) yang menemukan bahwa dengan adanya Alokasi Dana Desa dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan kemandirian desa. Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan (Alfiah, 2016). Pengelolaan keuangan baik dari anggaran sampai realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan Aparat Pemerintah Daerah. Total jumlah pengalokasian dana desa yang di berikan Pemerintah Pusat kepada Provinsi Jawa Barat sebesar Rp 4.547.513.838.000.

Kebijakan desa atau kewenangan desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum pun memiliki wewenang tersebut. meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan, peraturan desa merupakan bentuk tindak lanjut serta penjabaran dari peraturan yang lebih tinggi, bukan untuk menjalankan otonomi secara independen, melainkan tanggung jawab otonomi desa tetap ada dibawah wewenang dan pengawasan pemerintah

kota/kabupaten. Serta kebijakan desa sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini didukung dengan penelitian (Justita Dura, 2014) yang mengemukakan bahwa kebijakan pada pemerintah desa meskipun berskala kecil dan lokal yang mencakup wilayah administrasi desa, desa memiliki hak dan wewenang berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum serta pembangunan desa sendiri secara khusus.

Kelembagaan desa berperan terutama partisipasi masyarakat dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan ADD sangatlah penting, karena masyarakat akan lebih leluasa berekspressi mencapai kemajuan, pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya, kontrol langsung secara intensif dari Badan Permusyawatan Desa sehingga dapat menekan penyimpangan, dan semakin berfungsi Lembaga Pemerintahan Desa dan Kemasyarakatan di desa. Hal ini didukung dengan penelitian (Dendi Syaiful Akbar, 2017) yang menemukan bahwa BPD mempunyai kewajiban untuk mengusung bahwa prinsip transparansi dalam pertanggungjawaban ADD harus diterapkan, selain itu BPD memastikan bahwa pelaksanaan ADD harus berjalan sesuai aturan yang berlaku. Kehadiran BPD di Desa telah memberikan ruang/celah gerak yang sangat positif dalam konfigurasi khususnya masyarakat desa dengan menyampaikan tuntutan hak politiknya. BPD di Desa merupakan wahana dalam menampung aspirasi masyarakat serta menyalurkan aspirasi rakyat sekaligus berperan dalam membuat kebijakan bersama.

Banyaknya permasalahan yang timbul di Desa di karenakan kurangnya ke ingin tahuan masyarakat desa tentang desanya sendiri. Bagi mereka sudah bisa menikmati fasilitas desa, bekerja, mendapat pelayanan yang baik, bersekolah, dan kesehatan masyarakatnya sudah sangat cukup. Kurangnya minat masyarakat yang ingin mengetahui tentang keuangan di Desanya sangatlah banyak. Serta permasalahan lain timbul karena penyusunan laporan keuangan pemerintah desa sering kali di anggap tidak sesuai dengan pemerintah kabupaten. Penulis juga sangat ingin mengetahui keadaan Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa. Benarkah berlaku dan berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018)”**.

## **1.2 Permasalahan**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan penelitian diatas, maka penulis mengemukakan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018?

2. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018?
3. Apakah kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018?
4. Apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ngamprah Tahun Anggaran 2018?

### ***1.2.2 Pembatasan Masalah***

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang terdapat dalam penelitian ini, serta banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, maka peneliti membatasi masalah dengan hanya meneliti tiga faktor yaitu faktor alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa. Dalam penelitian ini juga membatasi responden hanya pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 dan masyarakat desa khususnya Rukun Tetangga yang berada di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

### ***1.2.3 Perumusan Masalah***

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

Bagaimanakah pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2018.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan bagi pihak Universitas, khususnya mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam mengembangkan kurikulum atau mata kuliah yang lebih baik terutama berhubungan dengan kewirausahaan di masa mendatang.

## 2. Bagi Penulis

Dapat menjadi alat untuk memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan pada akuntansi publik. Semakin mengetahui berbagai macam alokasi dana yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada daerah, serta mengetahui faktor-faktor kesejahteraan masyarakat di desa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agus, P. (2015). *Pengelolaan Keuangan Desa: Sistem dan Prosedur Pertanggungjawaban Keuangan Desa*.
- Alfiah, I. F. (2016). *Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat. Thesis. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas*.
- Akbar, D. S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD)(Penelitian Pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Sadananya). *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 5(2).
- Asni, F., Maryunani, S., & Budi, D. (2013). *The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau)*. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)* ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 10, Issue 4 (May. -Jun. 2013), PP 01-09.
- Azzahro, I. F. (2016). Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *SKRIPSI Jurusan Manajemen-Fakultas Ekonomi UM*.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana. (2017). Diambil kembali dari <https://www.bkkbn.go.id/>. Diakses 3 Juli 2018.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung Barat. (2018). Kecamatan Ngamprah Dalam Angka Tahun 2018. Bandung Barat: Badan Pusat Statistik.
- Badan Statistik Nasional. (2017, 4 17). *Statistik Kesejahteraan Rakyat 2017*. Diambil kembali dari <https://www.bps.go.id/publication/2017/12/28/5dc3593b43f3d4ac1fb77324/statistik-kesejahteraan-rakyat-2017.html>. Diunduh 3 Juli 2018.
- Badrudin, R. (2012). *Ekonomika Otonomi Daerah*. UPP STIM YKPN.
- Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat. (2017). *Basis Data Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2017*. Kabupaten Bandung Barat: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat.
- Dura, J. (2016). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat

(studi kasus pada desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal JIBEKA*, 10, 26-32.

Fajri, R. (2015). Akuntabilitas Pemerintah Desa pada Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Kantor Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(7), 1099-1104.

Gendro, W. (2011). Merancang Penelitian Bisnis Dengan Alat Analisis SPSS Dan Smart PLS. *Yogyakarta: UPT STIM YPTK*.

Ghozali, I. (2011). Analisis Multivariate Program IBM SPSS 19. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.

Hanif, N. (2011). Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. *Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama*.

Hermana, A. A. (2015). *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).

Husin, D. (2017). Flexibility of Budget Accountability Using Flow Modification in The Design of Village Financial Accounting. *Asia Pacific Fraud Journal*, 1(1), 19-35.

Indonesia, R. (2014). Pengelolaan Keuangan Desa. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 113*.

Indonesia, R. (2017). Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 86*.

Indonesia, P. N. R. (2017). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Indonesia, R. (2016). Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa*.

Indonesia, P.R (1945). Naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.



- Indrawati, S. M. (2017). *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Keuangan, D. S. A. (2017). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 1 (revisi 2017)*.
- Khoerunnisa, F. M. (2016). *Dampak Program Simpan Pinjam Perempuan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Di Desa Teja Kabupaten Majalengka*.
- Kurniawati, Y., & Pangayow, B. J. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung, Kebijakan Kampung Dan Kelembagaan Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 12(2), 77-87.
- Kurrohman, T. (2015, August). Accountability of planning on village fund allocation in osing community in Banyuwangi. In *Proceedings of The International Conference on Accounting Studies 2015*, 320-324.
- Lestari, I. D. T. S. (2015). *Permasalahan Penegakan Aturan Kebijakan Daerah (Studi Kasus Kegiatan Eksploitasi Tambang Marmer Ilegal di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)* (Doctoral dissertation, Universitas Sebelas Maret).
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi 2*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Martha, W. (2014). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Di Kota Bandung (Survey Diinstansi Pemerintah Kota Bandung)*(Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Nafidah, L. N., & Suryaningtyas, M. (2016). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 3(1), 214-239.
- Pemerintah Negara Republik Indonesia (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Presiden Republik Indonesia (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Priyatno, D. (2010). *Paham analisa statistik data dengan SPSS*. Yogyakarta: Mediakom.
- Putra, C. K. (2013). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 1(6), 1203-1212.

- Putri, A. A. (2017). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Simangunsong, F., & Wicaksono, S. (2017). *Evaluation of Village Fund Management in Yapen Islands Regency Papua Province (Case Study at Pasir Putih Village, South Yapen District)*. *Open Journal of Social Sciences*, 5(09), 250-268.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarna, A. (2015, November 22). *Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa*. Retrieved from *Keuangan Desa*: <https://www.keuangandesas.info/2015/11/pelaksanaan-pengelolaan-keuangan-desa.html>. Diakses 3 Juli 2018.
- Sutedi, Adrian. (2012). *Good Corporate Governance, Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafi'i, R. I., Mahsuni, A. W., & Afifudin, A. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Pundungsari Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang). *Jurnal Riset Akuntansi*, 7(02).
- Taufan, M. I. (2016). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi survey pada 17 Dinas Kota Bandung)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Tim Penyusun Buku Pedoman Penyusunan Skripsi. (2014). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. Hamka.
- Wahyudi, I. (2010). Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*.
- Wardhani, S. K. (2018). Implementasi Alokasi Dana Desa Ta 2016 Di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Menurut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015.